

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- ____ dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- ____ *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- ____ *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Bagijo , Himawan Estu, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2014.
- Baharudin, Hamza, *pemikiran mengenai hukum*, Nala cipta Lietra, Makasar 2010.
- Djarmiko, M. Hary,, *Penyidikan Pajak*, biro hukum dan Humas badan Administrasi, Jakarta 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit Kencana, Jakarta, 2022.
- Eleanora , Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, 2021.
- Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik yang Terindikasi Tindak Pidana*, Yuma Pustaka, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Martien, Dhoni, *Politik Hukum Kenotariatan*, Mitra Ilmu, Makasar 2023.
- Marwan, M dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan IV, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Minarno, Nur Basuki, *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Uang Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sesung, Rusdianto, dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakatra, 1992.

Jurnal

- Bilqis Zuhriyah, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Pemberian Izin Penyitaan Akta Minuta Kepada Penyidik*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama, No.5 No. 2 Oktober 2021.
- Denny Saputra, dkk *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022.
- Dila May Sekarsari, dkk, *Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No 3, 2002.
- Egus Kurniawan, *Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar, Kertha Wicara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2. No.1, 2013.
- Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Officium Notarium No. 2 vol. 1 April 2021.
- Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Officium Notarium No. 2 Volume. 1 Agustus 2021.
- Nursyamsudin, Samud, *Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 149 Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainien, *Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris*, Jurnal Officium Notarium No. 1 vol. 2 April 2022.
- Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, *Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Suamidi, *Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum Volume VIII Nomor 1. Edisi Juni 2016.
- Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 2 April ,2014.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Aturan Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUUX/2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVIII/2020
Surat Mahkamah Agung Agung No: MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986.
Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860.
Kode etik notaris Banten, 29-30 Mei 2015.

Website

<https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jatim-gelar-sidang-pemeriksaan-mknw-terhadap-lima-notaris>
www.pn-tais.go.id/alur-izin-penyitaan